

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI KAMIS
9 NOV 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



SAH, RANPERDA INISIATIF PUG JADI PERDA



ASET PEMPROV KALTIM BELUM
TERKELOLA DENGAN BAIK



Rapat Paripurna 40 DPRD Kaltim (hms)

SAH, RANPERDA INISIATIF PUG JADI PERDA

SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kaltim berhasil menyelesaikan pembahasan Ranperda Perubahan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah yang merupakan inisiatif Pemprov Kaltim. Ranperda tersebut bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan manusia di Kaltim.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV Puji Setyowati dalam Rapat Paripurna Ke 40 yang digelar di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Rabu (8/11/2023).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. Rapat juga dihadiri oleh Asisten III Setda Kaltim Reza Indra Riadi yang mewakili Pj Gubernur Kaltim.

Puji Setyowati mengatakan, Ranperda Perubahan PUG akan menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam melaksanakan strategi pembangunan pengarusutamaan gender di daerah. Ia menjelaskan, pengarusutamaan gender adalah integrasi peran gender dalam kebijakan dan program pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

"Kesetaraan gender adalah di mana laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala jenis kelaminnya, sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi," kata Puji Setyowati.

Ia menambahkan, dengan perubahan Perda ini, diharapkan kepentingan perempuan dan laki-laki dapat terakomodir dalam setiap tahap pembangunan, sehingga keduanya

menikmati hasil pembangunan secara seimbang.

"Dengan demikian, tujuan PUG akan tercapai dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan," ujarnya.

Puji Setyowati juga mengungkapkan, Komisi IV bersama dengan Biro Hukum Setda Kaltim dan DKP3A Kaltim telah melakukan percepatan penyelesaian Ranperda tersebut.

Ia berharap, Ranperda tersebut dapat segera difasilitasi oleh Kemendagri RI, sebagaimana permohonan yang telah diajukan Pimpinan Dewan kepada Gubernur Kaltim. Ia mengatakan, hal ini penting untuk segera menetapkan dan mengundang Perda tentang PUG di Kaltim.

Muhammad Samsun, sebagai pimpinan rapat, menyatakan bahwa laporan akhir hasil kerja Komisi IV telah selesai dan sesuai dengan tata tertib dewan. Ia juga menyampaikan kepada anggota dewan untuk memberikan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan PUG tersebut.

"Ini adalah agenda kita selanjutnya pada rapat paripurna hari ini, yaitu persetujuan DPRD Kaltim terhadap Ranperda inisiatif Pemprov Kaltim tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang PUG Dalam Pembangunan Daerah menjadi Perda, dan pendapat akhir kepala daerah," kata Muhammad Samsun.

Dalam paripurna, forum yang menghadiri sepakat untuk menyetujui Ranperda PAG menjadi produk hukum yang DPRD Kaltim lahirkan tahun ini. (eky/adv/dprdaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



AKADEMISI HUKUM UNMUL DAN ALHI SILATURAHMI DENGAN DPRD KALTIM

SAMARINDA - Sejumlah akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul) dan Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI) melakukan kunjungan silaturahmi ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa malam lalu (7/11/2023).

Kunjungan ini diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu yang mewakili pimpinan DPRD Kaltim di Ruang VIP Gedung D, Lantai 6 DPRD Kaltim. Ia yang didampingi Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin, mengungkapkan rasa senang dan terima kasih atas kedatangan para akademisi hukum tersebut.

"Kami senang dan berterima kasih atas kunjungan bapak dan ibu di kantor kami. Ini merupakan kesempatan untuk bersilaturahmi, berdiskusi, dan bertukar pikiran antara DPRD Kaltim dan para pakar atau akademisi hukum dari FH Unmul dan ALHI," kata Demmu.

Polisiti PAN ini, juga mengungkapkan bahwa DPRD Kaltim selalu berusaha menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur, baik negeri maupun swasta. Ia menilai bahwa peran dan kontribusi pemikiran akademisi sangat penting dalam penyelenggaraan pe-

merintahan dan pembangunan di daerah, khususnya dari aspek hukum.

"Setiap lini pemerintahan dan kebijakan pembangunan tidak bisa lepas dari aspek hukum. Termasuk kami sebagai anggota DPRD yang memiliki tugas dan fungsi legislatif. Kami terbuka menerima saran, masukan, bahkan kritik membangun dari para akademisi hukum untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kami sebagai wakil rakyat," ujarnya.

Legislator Dapil Kukar ini, juga menyampaikan apresiasi atas rencana pelaksanaan seminar internasional dan rapat kerja nasional ALHI yang akan diselenggarakan di FH Unmul. Ia berharap kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan maksimal, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas fakultas hukum di Kalimantan Timur, Indonesia, dan masyarakat luas.

Acara silaturahmi ini ditutup dengan penyerahan cinderamata dari DPRD Kaltim kepada akademisi FH Unmul dan ALHI. Cinderamata tersebut diserahkan oleh Demmu kepada Dekan FH Unmul Mahendra Putra Kurnia, dan oleh Jahidin kepada Ketua ALHI Juajir Sumardi. (Eky/Adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



ASET PEMPROV KALTIM BELUM TERKELOLA DENGAN BAIK

SAMARINDA - Aset-aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih banyak yang belum dikelola dengan baik.

Seperti Hotel Atlet Sempaja yang dibangun pada tahun 2008 sebagai sarana penunjang PON XVII di Kalimantan Timur.

Hal demikian menjadi sorotan Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. Hotel Atlet yang berlokasi di Komplek Stadion Sempaja yang kini berganti nama menjadi Gelora Kadrie Oening tersebut, saat ini dibiarkan tak difungsikan. Padahal, menurutnya hotel tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah.

"Seyogyanya itu tidak berpikir hanya cuma untuk atlet fasilitas atlet, Pemprov harus pikirkan bahwa pasca ini mau seperti apa.

Jadi ketika ada momentum event-event nasional terkhususnya di Kalimantan Timur itu bisa digunakan," terangnya kepada media ini, Rabu (8/11/2023).

Sapto menilai bahwa bangunan tersebut sejak awal ditujukan sebagai hotel. Bila kembali dimanfaatkan sebagai hotel kondisinya sudah tidak layak. Dan bila diperuntukan atau dialihfungsikan untuk hal lain maka perombakan harus dilakukan.

"Ini yang menjadi kendala, bahwa ketika kita bicara memanfaatkan itu sudah tidak

layak.

Kalau mau dibuat hotel selain peruntukan awalnya, harus merombak mau ndak mau suka ndak suka," ucapnya.

Pemerintah provinsi berencana untuk memanfaatkan kembali hotel ini sebagai gedung perpustakaan atau tempat usaha kuliner dan UMKM.

Beberapa pihak swasta juga tertarik untuk mengelola hotel ini, seperti Bakrie Group yang menawarkan Rp 38 miliar untuk mengambil alih hotel ini pada tahun 2013. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan pasti tentang nasib hotel ini.

"Nah itu beberapa kali itu ditawarkan oleh pihak ketiga tapi tidak pernah clear juga. Ya enggak pernah tuntas," bebarnya.

Ia berharap, pemerintah bisa lebih bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola aset-aset milik daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah.

"Kita harus bersama-sama mengawal aset-aset kita. Jangan sampai kita rugi dan menderita karena kelalaian pemerintah. Kita harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara," pungkasnya. (eky/Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati, dan Anggota Komisi IV Fitri Maisyaroh

PUJI SETYOWATI DAN FITRI MAISYAROH SAMPAIKAN MATERI KEPEMIMPINAN KEPADA PELAJAR MTS NEGERI SAMARINDA

SAMARINDA – Sebanyak 350 siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Samarinda bertandang ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) tentang Suara Demokrasi, pada Rabu (8/11/23).

Ratusan pelajar tersebut dibekali pengetahuan berkaitan tentang Motivasi Kepemimpinan dan Kiat serta Tantangan Menjadi Pemimpin. Materi secara langsung disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati dan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh.

Siswa dan siswi MTs Negeri Samarinda mengikuti kegiatan secara terpisah, yang mana dari total keseluruhannya dibagi menjadi 2 grup dengan 2 sesi pemaparan yang dilaksanakan di Ruang Rapat sisi kiri dan sisi kanan Gedung E Lantai Dasar Kantor DPRD Kaltim.

“Saya pikir ini adalah langkah strategis yang dilakukan oleh MTs Negeri Samarinda dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang sehat, pintar, cerdas dan juga unggul, mempunyai daya saing dan yang paling penting mereka mempunyai karakter yang baik,” tutur Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati saat ditemui usai menyampaikan paparan materinya.

Apresiasi itu diberikannya mengingat kunjungan MTs Negeri Samarinda ke DPRD Kaltim ini menurutnya ialah bagian daripada proses pembelajaran putra putri peserta didik, dalam menumbuhkan karakter kepe-

mpinan di P5.

“Harapan kita kurang lebih 26 tahun lagi mereka yang merupakan generasi Z berumur 13 atau 14 tahun ini adalah calon-calon pemimpin kedepan. Sejak dini sudah dipersiapkan tidak hanya secara ilmu pengetahuan. Tetapi juga bagaimana kepekaan sosial di dalam menghadapi perubahan-perubahan di era digitalisasi dan juga bagaimana menumbuhkan karakter bagi anak-anak didik,” pungkasnya.

Selaras dengan itu, Kepala MTs Negeri Samarinda Misbakhur Sururi membenarkan bahwa kegiatan tersebut ialah salah satu rangkaian dari pembelajaran yaitu kegiatan P5 yang mana dilaksanakan dengan tujuan agar pelajar dapat mendapatkan pembelajaran secara langsung di luar lingkungan sekolahnya.

“Sehingga anak diajak untuk real belajar, turun mengalami atau bahkan melakukan pengalaman-pengalaman hidup. Tujuannya ketika nanti siswa terjun ke masyarakat, mereka sudah pernah punya pengalaman di dalam melaksanakan kehidupan atau bahkan pernah mempelajari tentang penyelesaian permasalahan yang ada di lingkungan kita,” ungkap Misbakhur Sururi menambahkan.

Setelah itu kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata dari DPRD Kaltim untuk MTs Negeri Samarinda dan dari MTs Negeri Samarinda untuk DPRD Kaltim. (adv/dprd Kaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Gedung DPRD Kaltim (ist)

SEKRETARITAT DPRD KALTIM DIMINTA TERTIB ADMINISTRASI

SAMARINDA - Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Kalimantan Timur, Andrie Asdi, mengimbau seluruh komponen di lingkungannya untuk tertib administrasi.

Menurutnya, tertib administrasi dalam tugas kesekretariatan DPRD, termasuk keuangan maupun penatausahaan lainnya, merupakan bentuk tanggung jawab dan kesiapan menghadapi proses pemeriksaan.

Andrie menegaskan bahwa tertib administrasi menjadi penting karena dengan kelengkapan dan kerapian dokumen tentunya akan memudahkan proses pemeriksaan.

"Nantinya ketika diaudit tidak terjadi kekeliruan yang tidak diharapkan," katanya pada awal pekan ini.

Andrie juga menyinggung prinsip tata

kelola pemerintahan yang baik yang merupakan suatu konsep yang menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif terhadap kepentingan rakyat.

Prinsip tersebut yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan dan keadilan, hukum dan supremasi hukum, visi strategis, pengawasan, dan konsensus.

"Konsep ini telah menjadi perhatian banyak pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagai salah satu syarat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan," tutupnya. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi "Menuju UMKM Kompetitif" di Aula Kecamatan Balikpapan Selatan, Selasa (7/11/2023). (hms)

UMKM KOMPETITIF, KETUA DPRD KALTIM APRESIASI KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

BALIKPAPAN - Kecamatan Balikpapan Selatan menggelar sosialisasi dan edukasi "Menuju UMKM Kompetitif" di Aula Kecamatan, Selasa lalu (7/11/2023). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud yang membuka kegiatan ini mengatakan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian masyarakat. Ia mengapresiasi upaya Kecamatan Balikpapan Selatan dalam mengembangkan potensi UMKM di daerahnya.

"Tanpa dukungan UMKM akan sulit berkembang. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Kecamatan Balikpapan Selatan yang telah mengadakan kegiatan ini. Saya harap ini bisa menjadi contoh bagi kecamatan-kecamatan lain di Kaltim," ujar Hasanuddin yang akrab disapa Hamas.

Hamas juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah menyediakan berbagai program yang pro terhadap UMKM. Namun, ia mengakui bahwa sosialisasi program-program tersebut masih kurang maksimal.

"Ada banyak program yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), perizinan online, pendampingan, dan pelatihan. Saya berharap pelaku UMKM bisa lebih aktif mencari informasi dan mengikuti program-program tersebut. Ini akan sangat membantu mereka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk mereka," tutur Hamas.

Politikus Golkar ini juga menekankan bahwa UMKM telah membuktikan ketangguhannya di tengah pandemi Covid-19. Banyak usaha besar yang terpaksa tutup, tetapi UMKM masih bisa bertahan dan bahkan berkembang.

"UMKM adalah penopang perekonomian masyarakat. Di saat pandemi, UMKM mampu beradaptasi dan berinovasi. Ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi yang besar untuk menjadi usaha yang kompetitif. Saya berharap generasi muda juga tertarik untuk terjun ke dunia UMKM," imbuh Hamas.

Sementara itu, Camat Balikpapan Selatan Muhammad Hakim mengatakan bahwa UMKM merupakan solusi dalam menciptakan kemandirian perekonomian berbasis kerakyatan. Ia menilai bahwa UMKM sangat dibutuhkan di wilayahnya yang

memiliki jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah.

"Kecamatan Balikpapan Selatan ini terdaftar ada 700 ribu lebih jiwa, dan diprediksi akan terus bertambah seiring menjadi daerah yang bertetangga dengan IKN. Ini membuat persaingan usaha semakin ketat. Karena itu, kami mengadakan kegiatan ini untuk memberikan bekal informasi yang diperlukan bagi pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk yang kompetitif," jelas Hakim.

Hakim juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kaltim yang telah hadir dan memberikan dukungan kepada UMKM di Kecamatan Balikpapan Selatan. Ia berharap dukungan tersebut tidak hanya untuk UMKM saja, tetapi juga untuk sektor-sektor lain seperti pendidikan dan infrastruktur.

"Kami mengapresiasi dukungan pak Ketua DPRD yang telah banyak membantu kami melalui bantuan keuangan provinsi kepada pemerintah kota Balikpapan. Kami berharap kerjasama ini terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Balikpapan Selatan khususnya dan Kaltim pada umumnya," pungkas Hakim. (adv/dprd Kaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari

SEMANGKA UNTUK GAZA, GALANG DANA DAN SOLIDARITAS UNTUK PALESTINA

SAMARINDA - Melihat situasi yang terjadi di Palestina, kian hari terus melaporkan korban jiwa. Maka Kalimantan sebuah rumah kreasi digital berbasis di Samarinda, bekerja sama dengan Kedai Suguhan jaringan kedai kopi yang juga berlokasi di Kota Samarinda, berinisiatif menggelar malam penggalangan dana bertajuk Semangka untuk Gaza, Galang Dana dan Solidaritas untuk Palestina.

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 10 November 2023 mendatang, yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Acara ini akan dilaksanakan di Kedai Suguhan, Jalan Bhayangkara Nomor 51 Kota Samarinda mulai pukul 16.00 Wita.

Founder Kalimantan Rusdi menjelaskan, inisiatif galang dana datang dari komunitas jurnalis dan beberapa penulis yang ada di Kota Samarinda.

"Saya bersyukur, niat ini difasilitasi oleh kawan-kawan dari Kedai Suguhan yang bersedia membantu memberi tempat dan menyelenggarakan kegiatan," ungkap Rusdi.

Bermula dari komunikasi secara pribadi kepada beberapa rekan sesama jurnalis dan penulis, Rusdi mengaku berbahagia karena niat untuk menggelar pengumpulan dukungan untuk masyarakat Gaza dan Palestina ditanggapi antusias oleh sejumlah musisi yang menyatakan siap ikut meramaikan acara.

"Jadi nanti ada penampilan dari Paman Dobleng, Tanpa Kelas Band, pembacaan puisi dari salah satu jurnalis senior di Kaltim, juga penampilan dari Komunitas Guitar Six Strings," jelas Rusdi.

Sementara itu, pemilik Kedai Suguhan, Andi Desky, menyebut selain sejumlah nama penampil yang sudah menginformasi kehadiran. Panitia juga masih membuka kesempatan bagi siapapun yang berkeinginan untuk ikut tampil dan memberikan dukungan.

"Silakan yang ingin ikut tampil, bisa menghubungi panitia. Atau



Penggalangan Dana dan aksi Solidaritas Palestina bertajuk 'Semangka Untuk Gaza', yang akan digelar 10 November 2023.

mau memberikan dukungan lain support acara, kami sangat terbuka," ujar Andi.

Tak cuma penampilan para performer, galang dana juga akan diisi dengan penjualan buku dari sejumlah penulis.

"Ada buku berjudul Perang di Samarinda, karya Sejarahwan Kalimantan Timur Muhammad Sarip, dan buku Kasak-kusuk Pagebluk yang hasil penjualannya diserahkan 100 persen untuk Palestina," tukas Andi.

Para pengunjung yang ingin berdonasi, nantinya akan disediakan barcode Quick Response (QR) khusus yang disediakan di tempat acara.

"Tapi kalau yang mau donasi pakai uang tunai, bisa juga langsung. Semua menu yang terjual di hari kegiatan berlangsung, juga sebagiannya akan didonasikan," beber Andi.

Lebih lanjut, untuk memastikan donasi tersalurkan dengan baik. Andi mengatakan panitia bekerjasama dengan Yayasan Rumah Zakat Indonesia Cabang Kota Samarinda, untuk menyalurkan donasi.

"Pokoknya jangan lupa hadir dan tunjukkan solidaritas kalian. Yang mau ikut tampil bisa hubungi panitia lewat DM atau kontak kami," pungkas Andi. (rls)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



KAKEK 64 TAHUN CABUL ANAK DI BAWAH UMUR, KORBAN DIBERI UANG RP 10 RIBU

SAMARINDA - Reskrim Polsek Sungai Kunjang kembali mengamankan pria berinisial SPR (64) seorang penjaga malam, karena melakukan perbuatan cabul terhadap anak usia 10 tahun.

Pelaku di tangkap di Jalan Jakarta 1, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang.

Kapolsek Sungai Kunjang, Kompol Zainal Arifin,SH mengatakan bahwa benar pihaknya mengamankan pelaku pada Senin (6/11) malam.

Kapolsek membeberkan, pelaku mengaku melakukan perbuatan cabul tersebut sejak akhir tahun 2021 atau sejak korban masih duduk di bangku SD kelas II.

Namun saat naik ke kelas III hingga terakhir kali tersangka melakukan perbuatan cabul tersebut pada hari Jumat (27/10/2023) sekira pukul 12.00 Wita. Pelaku melakukan perbuatan tersebut terjadi di Jalan Jakarta I, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang dan di jalan raya sepanjang Jalan Jakarta I, Kelurahan Loa bakung, Kecamatan Sungai Kunjang.

"Untuk perbuatan cabul yang pertama kali dilakukan pelaku ketika berada di rumah korban, saat ada kesempatan atau situasi aman. Dalam artian ibu Korban tidak ada di rumah atau berada di dalam kamar. Pelaku kemudian melakukan perbuatan cabul tersebut," kata Kapolsek.

Adapun pelaku sering melakukan perbuatan cabul tersebut tidak lama dikarenakan

takut aksinya diketahui oleh ibu korban. Selain itu pelaku juga melakukan perbuatan cabul tersebut di jalan raya.

"Pelaku melakukannya saat menjemput korban pulang sekolah, di mana korban dan pelaku berbongcengan dengan menggunakan sepeda motor. Saat jalanan sepi kemudian pelaku melakukan aksinya cabul tersebut. Karena jarak rumah tidak terlalu jauh dan jalannya banyak yang rusak sehingga pelaku hanya melakukan 1 kali saya perbuatan cabul saat di jalan," beber Kapolsek.

Dikatakan, pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Namun pelaku biasanya memberikan uang sebesar Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu kepada korban sebelum melakukan perbuatan cabul kepada korban.

"Saat ini pelaku sedang dalam Pemeriksaan oleh unit Reskrim Polsek Sungai Kunjang," jelas Kapolsek.

Atas Perbuatannya Pelaku Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76e Sub 82 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp. 5 miliar. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



DIGELEDAH TERNYATA BAWA SABU, SEORANG PRIA LANGSUNG DIAMANKAN POLRESTA SAMARINDA

SAMARINDA - Satresnarkoba Polresta Samarinda telah melakukan pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan menangkap satu orang pelaku di Jalan Lambung Mangkurat, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.

Kasat Resnarkoba Polresta Samarinda menjelaskan kronologis kejadian yaitu, pada hari Senin (6/11/2023) diterima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan Lambung Mangkurat Gg.1, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir tepatnya di pinggir jalan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu.

Setelah pelapor dan saksi melakukan observasi dengan cermat, sekitar pukul 21.30 Wita dicurigai 1 orang laki-laki yang sedang berjalan kaki seorang diri yang baru saja kel-

uar dari alamat tersebut.

“Setelah dilakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki berinisial MD (29) dan ditemukan barang bukti berupa 1 poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,45 gram bruto yang berada di atas tanah dekat dengan pelaku berdiri yang sebelumnya dibuang sendiri dari genggam tangan kanan pelaku,” ungkap Kapolres.

Selanjutnya pelaku berinisial MD beserta barang buktinya diamankan di Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya Pelaku dijerat pasal 114 ayat (1) subsidi pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



Deluxe Room

ONLY

Rp ~~698.000,-~~

30% OFF

Rp **488rb**

NETT/NIGHT

benefits

Breakfast 2 pax	FREE Laundry Up To 2 pcs	FREE Kopi Inspirasi Buy 3, Pay 2
FREE Afternoon Tea	FREE Mini Mantou 5 pcs	

➔ **BOOK NOW**

0811 581 3669

www.hotelgrandkartika.com



MINIMALISIR ILEGAL FISHING DI ALIRAN SUNGAI, KELURAHAN LOA IPUH BENTUK POKMASWAS



**Makam Habib Tunggang Parangan di Anggana
Dilakukan Pemugaran**



Aliran anak sungai di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong. (Istimewa)

MINIMALISIR ILEGAL FISHING DI ALIRAN SUNGAI, KELURAHAN LOA IPUH BENTUK POKMASWAS

TENGGARONG- Sebagai upaya meminimalisir ilegal fishing di aliran Sungai Loa Ipuh, Pemerintah Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Bertujuan untuk meminimalisir dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal menggunakan jaring dan racun ikan di wilayah Kelurahan Loa Ipuh.

Melalui Lurah Loa Ipuh, Erri Suparjan, menyebut melalui Pokmaswas yang didukung oleh karang taruna dan warga setempat ini, mereka akan melaksanakan edukasi dan pengawasan terhadap praktik illegal fishing.

“Pengawasan illegal fishing yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir merupakan upaya pelestarian lingkungan di sekitar Sungai Loa Ipuh,” ucap Erri, Rabu (8/11/2023).

Ia juga mengungkapkan bahwa Kelurahan Loa Ipuh berencana menjadikan Sungai

Loa Ipuh sebagai lokasi pemancingan dan tujuan wisata. Erri merencanakan bahwa menjelang akhir tahun 2023, wisata pemancingan di aliran sungai tersebut akan mulai beroperasi.

Erri selanjutnya menjelaskan bahwa potensi perikanan di Sungai Loa Ipuh sangat besar karena sungai ini memiliki banyak ikan air tawar. Dengan adanya Pokmaswas dan usaha wisata ini, kelurahan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Termasuk membuka lapangan pekerjaan terutama bagi pemilik perahu yang dapat menyewakan perahunya kepada para pemancing dan wisatawan.

“Kami berusaha agar usaha ini dapat direalisasikan dalam waktu dekat,” pungkasnya. (Adv)

Penulis :Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Kades Batuah, Abdul Rasyid. (Istimewa)

Maksimalkan Pontensi Desa, Pemdes Batuah Lakukan Pencatatan Aset Desa

TENGGARONG- Dalam rangka menggali potensi sumber keuangan agar mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara maksimal. Pemerintah Desa (Pemdes) Batuah di Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara, rutin melakukan pencatatan aset desa.

Kepala Desa (Kades) Batuah, Abdul Rasyid, menyadari bahwa pencatatan aset desa sangat penting untuk mengamankan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Banyak aset desa yang belum tercatat dengan baik, dan hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan PADes.

"Aset-aset desa yang tidak tercatat dengan baik saat ini bisa menjadi sumber keuangan yang signifikan untuk desa jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perbaikan pencatatan aset adalah langkah penting untuk meningkatkan PADes," ujarnya, Rabu (8/11/2023).

Selain meningkatkan PADes, pencatatan aset yang baik juga akan membantu dalam perencanaan pembangunan desa. Misalnya, jalan usaha tani yang merupakan salah satu aset desa harus tercatat dengan baik agar pembangunan desa dapat berlanjut.

Rasyid akan membentuk tim percepatan pencatatan aset desa yang terdiri dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun (kadus), dan ketua Rukun Tetangga (RT). Tim ini akan bekerja sama dalam merampungkan pencatatan aset sehingga pemerintah desa dapat mengontrol dan mengelola aset dengan lebih efisien.

"Ketika semua aset tercatat dengan baik, maka kami akan mengintegrasikannya dalam peta desa, dan ini akan memudahkan pengawasan dan pengelolaan aset melalui situs web desa," tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i



Camat Marangkayu, Ambo Dalle. (Istimewa)

Atasi Stunting, Kecamatan Marangkayu Libatkan Perusahaan Swasta

TENGGARONG - Serius dalam mengatasi stunting, Kecamatan Marangkayu melibatkan pihak swasta untuk tekan stunting. Camat Marangkayu, Ambo Dalle, mengklaim bahwa kasus stunting di wilayahnya telah mengalami penurunan berkat kolaborasi berbagai pihak.

Ia pun turut mengapresiasi, terhadap langkah positif sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Beberapa perusahaan tersebut antara lain PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS).

Kedua perusahaan itu dinilai memiliki program yang positif seperti melakukan pembagian makanan atau asupan bergizi bagi masyarakat. Ia mengakui bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan sektor swasta, seperti perusahaan minyak dan gas (migas) yang berinvestasi di Kecamatan Marangkayu, berdampak pada penurunan stunting.

"Alhamdulillah, masalah stunting di Kecamatan Marangkayu mengalami penurunan,"

ungkap Ambo Dalle, Rabu (8/11/2023).

Dukungan yang diberikan mencakup upaya pemenuhan gizi masyarakat Kecamatan Marangkayu, terutama di wilayah operasi mereka setiap bulan. Misalnya PHKT memberikan makanan, seperti telur dan gizi lainnya secara langsung kepada warga. Bantuan tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di kantor kecamatan dan dibawa langsung ke sekolah-sekolah.

Upaya ini terus dilakukan secara rutin oleh perusahaan migas tersebut sesuai arahan Bupati Kukar, Edi Damansyah. Untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Pengendalian kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian dengan melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Serta berkoordinasi untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Jangan sampai ada masyarakat yang mampu tapi masih masuk data DTKS," tandasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i



Kantor Desa Tanjung Batu. (Istimewa)

Desa Tanjung Batu Bakal Bangun Gedung Pusban Tahun Depan

TENGGARONG- Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, tengah melakukan perencanaan untuk membangun gedung Puskesmas Pembantu (Pusban). Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa (Kades) Tanjung Batu, Husniansyah, Rabu (8/11/2023).

Ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Termasuk juga pembangunan pusban merupakan program yang menjadi prioritas Desa Tanjung Batu.

Menurut Husniansyah, pembangunan gedung Pusban ini sangatlah penting. Mengingat sampai saat ini Pusban Desa Tanjung Batu masih menumpang di Sekretariat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Desa Tanjung yang kondisinya sangat memprihatinkan.

“Bangunan lama yang terbuat dari kayu sudah lapuk, itulah sebabnya kami mengajukan pembangunan konstruksi beton di lokasi baru ini,” katanya.

Realisasi pembangunan ini akan menggunakan dana dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kukar. Saat ini, proses persiapan lahan sedang berlangsung di atas lahan seluas 600 meter persegi. Pembangunan fisiknya direncanakan akan dilakukan pada 2024 mendatang.

“Biaya untuk persiapan lahan mencapai sekitar Rp 200 juta,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Lampu Penerangan Jalan di Desa Tanjung Batu, Kukar. (Istimewa)

Jalan Lingkungan di Desa Tanjung Batu Kini Telah Dilengkapi dengan Lampu Penerangan

TENGGARONG- Program Terang Kampongku juga direalisasikan di Desa Tanjung Batu. Di desa yang terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang ini, program Terang Kampongku direalisasikan dengan melakukan pemasangan penerangan jalan yang menerangi empat RT.

Dengan alokasi anggaran senilai Rp 191 juta, sejumlah ruas jalan di Desa Tanjung Batu diterangi dengan lampu jalan bertena-ga surya. Dengan menggunakan energi matahari atau solar cell untuk menerangi jalan desa.

Dengan adanya program ini, dipastikan bahwa jalan yang melintasi empat RT di Desa Tanjung Batu akan menjadi terang. Jalan ini adalah akses utama yang menghubungkan desa tersebut dengan jalan poros di Kecamatan Tenggarong Seberang.

Proses pengadaan lampu jalan ini sendiri, sejatinya telah diajukan sejak beberapa tahun terakhir. Selama periode tersebut, desa yang merupakan lokasi Pembangkit Listrik

Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), belum memiliki penerangan jalan saat malam tiba. Meskipun menjadi pusat pasokan listrik untuk Kukar, Samarinda, dan Balikpapan.

“Harapan kami adalah agar Desa Tanjung Batu, yang merupakan produsen daya listrik, mendapatkan perhatian pemerintah terkait penerangan jalan,” ungkap Kepala Desa Tanjung Batu, Husniansyah.

Husni juga mengungkapkan bahwa dari 90 titik yang diajukan, hanya sekira 15 hingga 20 titik lampu jalan yang terealisasi, dengan dana sebesar Rp 191 juta. Langkah ini dianggap sebagai awal, dan mereka berharap puluhan titik lainnya yang belum dianggarkan dalam APBD Kukar 2023 akan direalisasikan pada tahun-tahun mendatang.

“Kami menyadari bahwa dana anggaran yang diberikan belum mencukupi untuk menjangkau semua titik,” pungkas Husni. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Kompleks Makam Habib Hasyim bin Yahya atau dikenal Habib Tunggang Parangan di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana. (Istimewa)

Makam Habib Tunggang Parangan di Anggana Dilakukan Pemugaran

TENGGARONG- Kompleks Makam Habib Hasyim bin Yahya atau dikenal Habib Tunggang Parangan di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana akan dilakukan pemugaran. Dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, dengan alokasi anggaran sekitar Rp1 miliar.

Camat Anggana, Rendra Abadi, mengatakan pemugaran makam bertujuan untuk menjadikan Desa Kutai Lama sebagai wisata budaya, religi, hingga wisata sejarah. Mengingat makam Habib Tunggang Parangan kerap dikunjungi para peziarah.

Untuk diketahui, Habib Tunggang Parangan memiliki peranan besar dalam mensyiarkan agama Islam di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya Kerajaan Kutai di masa pemerintahan Raja Aji Mahkota.

“Kutai Lama itu komplrit karena 3 item (wisata religi, sejarah, dan budaya) ada semua,” kata Rendra, Rabu (8/11/2023).

Tujuan pemugaran makam untuk memberikan fasilitas sarana prasana yang nyaman bagi para masyarakat yang berkunjung. Kompleks di sekitar makam diperindah, tempat parkir kendaraan roda dua dan empat diperluas. Selain itu, juga disediakan masjid untuk tempat beribadah.

Setiap bulannya tidak sepi dari penziarah dari berbagai daerah, baik itu pagi, siang hingga malam hari. Diprediksi dalam setahun ribuan orang yang datang. “Pada hari-hari besar Islam itu pasti ramai, puncaknya waktu haul,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i



PROGRES PROYEK JEMBATAN SAMPING PLTD TELIHAN 72 PERSEN, NOVEMBER AKHIR DIPASTIKAN RAMPUNG

BACA HALAMAN A2



KANTOR BPBD DIANGGAP TAK LAYAK, PEMKOT DIMINTA CARI SOLUSI



Kegiatan sidak Anggota Komisi III DPRD Bontang di Jembatan samping PLTD Kelurahan Telihan. (Dwi).

Progres Proyek Jembatan Samping PLTD Telihan 72 Persen, November Akhir Dipastikan Rampung

BONTANG – Komisi III DPRD Bontang menggelar sidak proyek jembatan di samping PLTD Kelurahan Telihan, Selasa (7/11/2023). Sidak ini dalam rangka meninjau pengerjaan jembatan tersebut.

Abdul Malik, Anggota Komisi II DPRD Bontang mengatakan, pengerjaan jembatan ini sudah berlangsung 71 persen, dimana tinggal dilakukan pengaspalan, sehingga mendekati kata rampung pada bulan ini.

"Maunya progresnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sebelum waktunya sudah selesai. Karena ini adalah akses utama, entah berangkat ke kantor, seko-

lah, ataupun rumah ibadah," paparnya saat diwawancarai, Selasa (07/11/2023).

Dengan adanya perbaikan jembatan tersebut, Abdul Malik berharap sangat bermanfaat bagi para masyarakat, apalagi ini menjadi salah satu akses utama.

Untuk sementara bisa dilewati bagi para pejalan kaki sebagai alternatif penyebrangan. Namun dari sisi keamanan bisa lebih diperhatikan lagi. Walaupun hanya jembatan dan pagar biasa, katanya lebih baik mengutamakan keselamatan.

"Untuk sementara bisa digunakan bagi para pejalan kaki, hanya untuk

sekedar menyebrang atau semacamnya, akan tetapi saya harap agar tetap safety," ungkapnya.

Anwar Nurdin, Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Peningkatan Ruang Kota (PUPRK) Bontang menjelaskan, proyek ini mulai pengerjaan pada April 2023 dan dikatakan akhir November optimis akan selesai pengerjaan.

"Ini sudah ditahap 72 persen, ya sekitar 71,8 persenlah intinya. Saya pastikan minggu terakhir November sudah selesai dan bisa digunakan," tutupnya.

Penulis: Dwi
Editor: Yusva Alam



Kunjungan lapangan Komisi II DPRD. (Syakurah/Radarbontang)

Kantor BPBD Dianggap Tak Layak, Pemkot Diminta Cari Solusi

BONTANG - Komisi II DPRD Bontang melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Sekolah Tinggi Teknologi Bontang (STITEK), Selasa (7/11/23). Kunjungan ini terkait masalah lahan parkir di antara 2 gedung tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakwag (BW) mengaku miris melihat kondisi kantor BPBD yang dinilai tak layak untuk ditempati, padahal BPBD baru saja naik kelas ke A tapi ruang kerja tidak sesuai.

"Miris melihat kondisi kantor tersebut, apalagi di sebelahnya ada gedung mewah milik pemerintah tapi disewakan," katanya.

Lebih lanjut, ia meminta kepada Pemkot Bontang untuk segera menindaklanjuti persoalan ini, dan mengajukan dua solusi untuk persoalan gedung

BPBD. Pertama ialah kontrak sewa STITEK tidak diperpanjang atau kedua mambangunan kantor baru untuk BPBD.

"Jangan sampai BPBD yang diminta untuk menyewa kantor, padahal ada gedung aset milik pemkot," tegasnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Bontang, Santy menyebut pihaknya akan segera menindaklanjuti usulan tersebut terkait kepastian status sewa gedung STITEK yang sebelumnya juga sempat dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh sekretaris daerah.

"Nanti akan segera kami bahas lagi untuk kepastian. Setelah ini kita akan bahas lagi kemudian mencari solusinya seperti apa," ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam



Abdul Malik, Anggota Komisi III DPRD Bontang (Dwi).

Warga Perum Griya Bontang Kuala Kembali Keluhkan Fasum dan Fasos

BONTANG - Warga di Perumahan Griya Wisata Bontang Kuala kembali mengeluhkan fasilitas umum dan fasilitas sosial di area perumahan yang dianggap sangat kurang memadai, Selasa (07/11/2023).

Abdul Malik, Anggota Komisi III DPRD Bontang mengatakan, telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Pemukiman yang merupakan inisiatif DPRD Bontang.

"Raperda ini sudah masuk tahap harmonisasi di Biro Hukum Provinsi Kaltim, dan selanjutnya akan diparipurnakan untuk disahkan jadi Perda (Peraturan Daerah)," ujarnya.

Selain itu tidak diserahkannya aset fasum dan fasos oleh pihak developer kepada Pemerintah Kota Bontang, sehingga bantuan dari pemerintah hingga pokok pikiran Anggota DPRD Bontang tidak bisa menyentuh fasum dan fasos

di sana. Dengan adanya Perda ini, diharapkan bisa menjadi landasan payung hukum.

"Ada yang didasari peraturan pemerintah, tujuannya agar penerima jasa fasilitas umum bisa ada kejelasan dan segala jenis fasilitas umum di dalamnya harus mendapat perhatian para pengembang," ungkapnya.

Dia juga berharap dengan adanya perda ini nantinya, dapat menjadi solusi permasalahan fasum dan fasos di Kota Bontang yang tak kunjung tuntas. Pengembang di Bontang kurang lebih ada 21, sementara yang terdata aktif ada 15. Lainnya meninggalkan catatan tertentu.

Terkait dengan perselisihan antara warga dan developer Perumahan Griya Wisata Bontang Kuala, Komisi III DPRD Bontang tidak bisa memberikan keputusan hukum yang mengikat.

"Sebab tugas kami hanya memediasi atau menjadi penengah atas perselisi-

han yang terjadi. Harapan besar permasalahan ini bisa segera selesai," ujarnya.

"Untuk menengahi permasalahan yang ada, kami telah melakukan Sidak keperumahan Griya dan menghadirkan developer untuk mendengar semua penjelasan semua pihak," imbuhnya.

Untuk permasalahan fasum dan fasos bukan kali pertama dialami warga Perum Griya Wisata. Sebab, pihaknya juga beberapa kali ingin membantu perbaikan rumah ibadah di salah satu perumahan di Bontang Barat tidak bisa karena proses wakaf yang belum rampung.

"Legal standing dari wakaf rumah ibadah itu harus jelas, karena ketika ingin mendapatkan bantuan dari APBD ataupun Pokok Pikiran anggota DPRD harus jelas Surat Wakaf, Akta Wakaf dan Sertifikat Wakafnya yang dikeluarkan Kementerian Agama Kota Bontang bersama pertanahan," tutupnya.

Penulis: Dwi

Editor: Yusva Alam



Kabid Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu RSUD Bontang, dr Tri Ratna Paramita. (Yahya Yabo)

Terapkan Sistem Kluster Agar Pasien Tak Perlu Lama Antre

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang menggunakan sistem kluster atau pengelompokan pasien untuk beberapa poli klinik yang tersedia. Hal ini demi memudahkan pasien, agar tidak perlu mengantre lama pasca mendaftar online.

“Dalam rangka efektivitas pelayanan dan meminimalisir banyaknya antrean. Untuk memberikan kepastian layanan yang sesuai dengan waktu jam pelayanan sesuai pendaftaran,” ujar Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu RSUD Taman Husada Bontang, dr Tri Ratna Paramita.

Ditambahkannya, saat ini ada klinik saraf dan tiga klinik lainnya yang telah melakukan kluster untuk pasien pada saat pemeriksaan. Pengelompokan waktu pelayanan ini sesuai dengan waktu pendaftaran, dan jam pelayanan dengan dikelompokkan dalam satu waktu.

“Yang sudah melakukan kluster ada klinik saraf. Ketika melakukan pendaftaran online maka sudah otomatis akan mendapatkan nomor dan waktu kedatangan,” jelasnya.

Selain itu, tiga klinik lainnya yakni klinik anak, klinik penyakit dalam, dan klinik paru telah melakukan kluster atau pengelompokan dimulai sejak 8 November 2023.

“Pertanggal, jadwal sesuai dengan waktu jam pengelompokannya. Pasien yang datang sesuai dengan jam layanannya, apabila pasien datang tidak sesuai jam pelayanan maka tidak dilayani. Harapannya pasien datang sesuai dengan jam pelayanan agar tidak menunggu lama,” terang dr Mitha.

Pengklusteran atau pengelompokan pasien ini baru dilaksanakan RSUD pada Agustus lalu, dan berlanjut pada November ini pada beberapa klinik.

“Harapan ke depannya bisa berurutan dengan pasien-pasien klinik lainnya, agar mengurangi antrean di ruang tunggu dan mengurangi penularan penyakit melalui airborne atau udara. Pasien bisa datang paling cepat 30 menit sebelum jadwal pelayanan yang tertera pada saat booking pendaftaran,” pungkasnya. (adv/yah)



Pegawai dan staf RSUD Bontang saat mengikuti pelatihan peningkatan SDM. (Yahya Yabo)

Tingkatkan Pelayanan, Pegawai dan Staf RSUD Bontang Ikut Training Race for Excellence

BONTANG – Karyawan dan Staf seluruh unit RSUD Taman Husada Bontang mengikuti pelatihan peningkatan SDM bertema 'Race For Excellence' pada 30 Oktober sampai 2 November 2023 bertempat di Hotel Tulip Balikpapan.

Kepala Bagian Hukum, Kehumasan dan Kerjasama RSUD Taman Husada Bontang, Syariful Hidayat mengatakan, kegiatan dilaksanakan dalam rangka peningkatan SDM untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan memberikan bekal kepada karyawan, dalam melayani masyarakat dengan ramah dan memiliki kekompakan bersama karyawan.

"Seluruh unit mengikuti kegiatan peningkatan SDM untuk pelayanan kepada masyarakat. Sesuai motto dan tata nilai RSUD Bontang," jelasnya.

Sementara materi yang diberikan Trainer Bota Public Speaking, Anggi V Goenadi mengenai bagaimana peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Fokus pemberian materi tentang 6C pada abad 21 Century Skill. Seperti Critical Thinking, Creativity, Communication Skill, Colaboration, Computational Thinking dan Compassion.

Selain pemberian materi yang disampaikan secara komprehensif, juga melalui Bound Challenge yang berisi aktifitas kelompok, game dan kompetisi.

"Tujuannya agar tim RSUD Bontang memiliki bekal keterampilan dan siap berdaya saing, sekaligus membangun kekompakan dan kerja tim yang solid dalam mencapai visi RSUD," terangnya. (adv/yah)



Kunjungan Tim RSUD Bontang untuk studi orientasi ke RSUD AWS Samarinda. (Yahya Yabo)

RSUD Bontang Studi Orientasi ke RSUD AWS Samarinda, Belajar Tata Kelola Kegawatdaruratan

BONTANG – Perawat dan bidan RSUD Taman Husada Kota Bontang mengunjungi RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) di Samarinda. Kunjungan dimaksudkan studi orientasi untuk melihat tata kelola Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD AWS Samarinda.

Sub Koordinator Penunjang Keperawatan RSUD Taman Husada Bontang, Bambang Sri Mulyono mengatakan, perawat dan bidan disambut oleh Wakil Direktur Penunjang RSUD AWS, dr Mazniati, MPH dan pemberian materi oleh pihak RSUD AWS Samarinda terkait tata kelola IGD.

“Perawat dan bidan yang ikut berjumlah 30 orang. Kami didampingi Kepala IGD AWS, melihat SDM, sarana prasarana, dan proses pelayanan di IGD,” ungkap Bambang, Selasa (7/11/2023).

Selanjutnya, ia mengatakan tujuan dari kegiatan studi orientasi perawat dan bidan yakni agar memahami penatalaksanaan IGD dan memperluas pengetahuan mengenai pengelolaan kegawatdaruratan.

“Agar perawat dan bidan mengetahui bagaimana pengelolaan dan tata kelola kegawatdaruratan,” terangnya.

Bambang menambahkan, melalui studi orientasi ini, harapannya untuk pelayanan IGD dapat menjadi pelayanan kegawatdaruratan terdepan sesuai moto dan tata nilai RSUD Bontang.

“Harapannya pelayanan kegawatdaruratan menjadi terdepan sesuai moto melayani sepenuh hati dan tata nilai Cepat, Efisien, Ramah, Inovatif dan Aman (CERIA),” sebutnya. (adv/yah)

Mancing Bareng 1 Ton Ikan Mas Akan Meriahkan HUT Ke-52 KORPRI Tahun Ini, Catat Tanggalnya!

BONTANG - Perayaan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemkot Bontang pada tahun 2023 ini dipastikan berlangsung dalam suasana yang lebih meriah. Pсалnya Pengurus KORPRI Kota Bontang telah menyiapkan sejumlah agenda yang bukan hanya menyentuh kalangan ASN, tetapi juga merangkul warga Kota Bontang dalam konsep bakti sosial KORPRI. Apa saja gregetnya? Yuk, simak penelusuran Tim Redaksi.

Ditemui di Graha Taman Praja Bontang Lestari, Sudi Priyanto, Kepala BKPSDM sekaligus Sekretaris KORPRI Kota Bontang mengaku ada beberapa agenda yang disiapkan pihaknya untuk memeriahkan milad KORPRI pada tahun ini.

Pertama, perayaan puncak berupa Upacara Hibryd Terpusat Pengurus KORPRI pada semua level tingkatan yang akan digelar pada 29 November 2023 mendatang di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang.

Hibryd akan dirangkai juga dengan penyerahan Satya Lencana Karya Satya PNS, uang purna tugas bagi ASN pensiun TMT Juli sampai dengan Desember 2023, penyerahan uang tali asih bagi ahli waris ASN yang meninggal pada periode yang sama, serta penyerahan uang pembinaan bagi atlet ASN berprestasi. Baik pada ajang PORPROV, PORNAS maupun MTQ ASN yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 lalu. Hibryd terpusat ini merupakan acara internal bagi korps abdi negara yang memang berulang tahun pada tanggal 29 November.

Kedua, dan ini yang menurut Sudi akan terasa istimewa; adalah gelaran Even bertajuk "Mancing Untung, Jalin Rukun = atau bisa disingkat MAUNJUN" yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-52 KORPRI Tahun 2023. "MAUNJUN, adalah bentuk bakti sosial KORPRI mewujudkan ASN yang manunggal dengan warga Kota Bontang," kata Sudi.

Dalam event tersebut, KORPRI menyiapkan 1 ton ikan mas yang akan dipancing bersama ASN dan warga Kota Bontang di Taman Pemancingan Tanjung Pura HOP 4 (Perumahan Griya Tata Selaras Gunung Elai).



Event ini juga dikemas dalam bentuk lomba mancing memperebutkan uang serta bagi pemancing yang beruntung dapat membawa pulang jackpot berupa ikan gurame, ikan lele, serta ikan mas berukuran jumbo penghuni Taman Pemancingan komersil terbesar di Kota Bontang itu.

Terlebih lagi, pihaknya juga menyediakan banyak doorprize menarik yang akan diumumkan selama para pemancing menunggu umpannya disambar. Karena itulah, Sudi mengajak ASN dan juga warga Kota Bontang meramaikan MAUNJUN pada tanggal 3 Desember 2023 mendatang (jangan lupa catat tanggalnya ya, Sob!). MAUNJUN ini juga merupakan bagian dari gelaran 77 even

Tahun 2023 Kota Bontang.

Ditemui di tempat terpisah, Sekda Kota Bontang yang juga merupakan Ketua KORPRI Kota Bontang, Ir. Hj. Aji Erlinawaty, MM atau yang biasa disapa Bu lin menyerukan ajakan yang sama.

"Yang pasti, MAUNJUN ini bagian dari upaya KORPRI memberi hiburan dan kontribusi positif bagi warga Bontang. Banyak manfaat yang akan didapat dari MAUNJUN, terutama kedekatan, keakraban ASN dan Warga Kota Bontang bisa terjalin sesuai tagline-nya: Mancingnya Untung, ter-Jalin juga Rukun-nya, terlebih lagi ikan merupakan sumber protein bergizi yang banyak digemari oleh masyarakat luas," tutup lin di sela kesibukannya. (adv)



Barang bukti dari 2 pengedar yang berhasil diamankan. (ist)

Sabu 9,06 Gram Disembunyikan di Kotak Minuman, 2 Pengedar Sabu Diamankan

BONTANG - Dua laki-laki berinisial EA (20) dan AR (23) asal Bontang ditangkap Sat Resnarkoba Polres Bontang, Rabu (8/11/2023) sekira pukul 09.30 Wita. Keduanya kedapatan membawa narkotika jenis sabu.

Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Pras-tiya melalui Kasat Resnarkoba, AKP Rihard Nixon Hernando Lumban Toruan mengatakan, keduanya tertangkap di lokasi yang berbeda.

EA (20) warga Tanjung Laut, Bontang Selatan ditangkap di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Belimbing, Bontang Barat. EA terlihat bolak-balik menggunakan sepeda motor dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan.

"Dia sempat melarikan diri, tetapi gagal. Tersangka juga terlihat sempat menjatuhkan kotak bekas minuman," ucapnya.

Setelah diperiksa, di dalam bekas minuman tersebut terdapat dua bungkus plastik bening yang dibungkus oleh kertas tisu. Diduga barang tersebut adalah sabu.

"EA sempat membuang sabu tersebut, akan tetapi kami langsung menemukannya. Setelah diinterogasi, tersangka EA mengatakan telah mendapatkan sabu tersebut dari rekannya AR,"

paparnya.

Mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung bergerak cepat menangkap AR (23) saat berada di Jalan Soekarno - Hatta, Gang Batu Bira, RT. 27, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan. Keduanya mengaku memang sudah bekerja sama.

Barang bukti EA yang telah diamankan adalah dua bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 9,06 gram, satu buah minuman teh kotak, dua lembar kertas tisu, satu unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam merah nomor polisi KT6371QF, serta satu unit HP oppo warna hitam.

Sedangkan terduga kedua, barang bukti yang telah diamankan ialah berupa satu unit Hand-phone Realme warna biru.

Pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 atau pasal 112 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

"Ancaman maksimal hukuman 20 tahun penjara," pungkasnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam



Ilustrasi kasus dugaan pelecehan seksual di bawah umur. (ist)

Ayah Kandung Diduga Lecehkan Anaknya Sendiri, Polisi Masih Dalam Kasus

BONTANG - Kasus dugaan pelecehan seksual kembali terjadi. Seorang ayah diduga tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya sendiri berusia 8 tahun.

Menurut informasi yang didapat, kasus ini berlangsung sejak 25 Oktober 2023 lalu, dilaporkan oleh ibu korban. Kasus asusila tersebut terungkap setelah korban berani bersuara, dan dari hasil pemeriksaan medis.

Ibu korban melapor ke Polres Bontang pada Rabu (01/11/2023) kemarin.

"Awalnya anak saya mengeluh sakit di bagian kelaminnya. Saya curiga ada apa-apa. Jadi bujuk dia (korban) untuk periksa ke Puskesmas dan ke rumah sakit," ucap ibu korban.

Dalam waktu dekat, pihak korban juga akan mendatangi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk diperiksa secara psikologis.

Akibat kejadian tersebut, sang anak pun mengalami trauma berat. Saat melihat ayahnya, sang anak selalu menangis histeris.

"Saya berharap agar pelaku bisa segera ditangkap," sambungnya.

Dikonfirmasi terpisah Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastiyana melalui Kasat Reskrim,

Iptu Hari Supranoto mengaku sudah menerima laporan dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur.

Hanya saja sampai saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut. Karena sebelum menangkap dan menetapkan tersangka, polisi harus menetapkan setidaknya dua alat bukti.

"Kami sudah menerima laporannya, ini masih akan koordinasi dengan ahli psikologi. Dari keterangan ahli itu bisa jadi alat bukti. Karena yang diduga korban kan masih berumur 8 tahun," ucap Iptu Hari Supranoto.

Kepada pelapor, dirinya meminta untuk bersabar. Karena polisi tidak akan tinggal diam saja atas semua laporan yang telah diterima.

Lebih lanjut berdasarkan hasil visum, Iptu Hari menuturkan, belum ada indikasi muara kepada kekerasan atau pelecehan terhadap korban.

Apalagi pelapor juga tidak mengetahui persis persoalannya, karena dirinya awalnya mendapatkan informasi dari kakak pelapor.

"Percayakan sama kami, kami juga terus tindaklanjuti pelaporan tersebut," pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam



Salahsatu barang bukti yang diamankan pihak kepolisian. (ist)

Penggelapan Pupuk, Supir Perusahaan Diringkus Polisi

BONTANG – Seorang pria berinisial EAW (29) ditangkap polisi lantaran diduga menggelapkan pupuk, Selasa (7/11/2023). Terduga pelaku kedapatan menggelapkan pupuk milik PT. Sumalindo Hutani Jaya, tempatnya bekerja.

Kejadian tersebut terjadi pada Kamis (26/10/2023) lalu, sekira pukul 17.00 Wita. Dilaporkan oleh security perusahaan korban penggelapan Pupuk.

Saat itu dikatakan pelapor, terduga pelaku sedang mengangkat pupuk dari gudang dengan menggunakan satu unit truck berwarna kuning bak kayu.

Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prastiya melalui Kapolsek Marangkayu, Iptu Fahrudi menyatakan, pelaku adalah salah satu supir dari perusahaan, yang bertugas untuk mengangkat pupuk tersebut dari gudang lalu diturunkan di lahan tempatnya bekerja.

"Akan tetapi, saat pengantaran tidak semua diturunkan, dia (tersangka) meminta

disisakan lima karung jenis NPK Merk Mahkota dalam truk. Diduga untuk kepentingan pribadi," ucapnya.

Dengan rencana, pupuk hasil penggelapan tersebut akan digunakan untuk berkebun sawit. Atas perbuatannya, ternyata EAW sudah menggelapkan sebanyak dua kali. Perusahaan tersebut mengalami kerugian senilai Rp. 4.050.000.

Saat ini, barang bukti yang diamankan berupa satu buah bekas plastik bagian dalam kemasan pupuk jenis NPK Mahkota, berwarna putih bening, serta sisa pemakaian berupa pupuk Jenis NPK Mahkota.

Tersangka pun telah diamankan di Mapolsek Marangkayu. Dengan jerat pasal 374 atau 372 KUHPidana tentang penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan.

"Ancaman maksimal 5 tahun penjara," pungkasnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam



PENAMPILAN ARMADA BAND BERLANGSUNG MERIAH, BUPATI JUGA AJAK MASYARAKAT DOAKAN PALESTINA

AD



**JELANG PEMILU, MASYARAKAT
JANGAN MUDAH TERPENGARUH**



Bupati Sri Juniarsih bersama vokalis Armada Band di pagelaran Berau EXPO.

PENAMPILAN ARMADA BAND BERLANGSUNG MERIAH, BUPATI JUGA AJAK MASYARAKAT DOAKAN PALESTINA

TANJUNG REDEB - Pada hari ke-7 Berau Expo dalam berlangsung meriah dengan menampilkan Armada Band. Dihadiri ribuan masyarakat Berau yang memenuhi Lapangan Pemuda, Kecamatan Tanjung Redeb, Selasa (7/11/2023) lalu.

Dalam kesempatannya, Bupati Berau, Sri Juniarsih yang didampingi oleh Kapolres Berau, AKBP Steyven Jonly Manopo dan Dandim 0902 Berau, Letkol Inf Dony Fatra naik keatas panggung utama untuk menyapa masyarakat yang hadir malam itu.

Sri menyapa masyarakat dengan menyebutkan 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Berau tersebut. Setelah itu, dirinya dengan Kapolres dan Dandim serta ditemani oleh vokalis dari Armada band, Rizal untuk bersama-sama mengajak masyarakat Berau berdoa untuk keselamatan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.

"Karena Palestina adalah saudara kita yang pertamakali mengakui kemerdekaan RI dan banyak lagi yang menunjukkan bahwa kita saudara kita. Mari kita semua mendoakan saudara kita yang ada di Palestina," ungkap Sri sambil mengibarkan bendera Palestina di depan ribuan masyarakat Berau.

Ditemui terpisah, Eksekutif Produser CV

Vocus Production atau EO Berau EXPO 2023, Morten mengatakan pelaksanaan rangkaian Berau Expo pada malam hari ini berlangsung lancar dan sukses, para pengunjung juga jauh lebih banyak dari hari-hari sebelumnya.

Namun, dengan banyaknya pengunjung yang datang tidak mempengaruhi kondisi keamanan, menurut Morten pelaksanaan kegiatan pada malam ini sudah sesuai dengan perencanaan persiapan yang pihaknya persiapkan.

"Alhamdulillah cuaca malam ini cerah dan juga mendukung. Para pengunjung juga terpantau damai dan berjalan sukses," ujar Morten.

Dirinya menambahkan, ia mengajak masyarakat Berau untuk kembali berkunjung ke pagelaran Berau Expo Tahun 2023 ini. Karena masih ada beberapa hari lagi hingga acara ini selesai.

"Tanggal 10 Inshaallah hari terakhir kita di Berau Expo. Masih banyak lagi penampilan yang akan kita tampilkan, begitu juga dengan artis ibukota yang akan kita hadirkan juga. Disamping itu ayo kita ramaikan juga stand dari OPD dan Instansi yang ada, serta UMKM yang ada disekitaran Lapangan Pemuda ini," tandasnya. (dez)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

JELANG PEMILU, MASYARAKAT JANGAN MUDAH TERPENGARUH

TANJUNG REDEB - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ketua DPRD Berau, Madri Pani meminta masyarakat tidak mudah termakan berita bohong.

Dirinya menilai, masyarakat berperan besar dalam menjaga kondusifitas di lingkungannya. "Selain itu, peran masyarakat juga untuk memberi pemahaman kepada yang belum melek politik," ungkapnya.

Menurutnya, persoalan agama merupakan isu yang riskan. Maka dari itu, masyarakat diminta tidak mudah terhasut oleh oknum-oknum yang menyebarkan informasi tidak benar.

"Terkait agama, hal itu merupakan isu yang gampang digoreng. Masyarakat harus cerdas, jangan

sampai terpecah belah," tuturnya.

Madri mengajak masyarakat untuk bersama menjaga persatuan dan kesatuan. Warga didorong untuk berpikir dewasa dengan tidak menjatuhkan satu sama lain.

"Kalau tidak dewasa dalam berpikir hanya emosi dan kepentingan kelompok itu yang membuat cerai berai," jelasnya.

Politikus NasDem ini berharap, masyarakat bisa memilih pemimpin yang bisa membawa Berau lebih baik di tahun emas.

"Politik yang sehat, merupakan politik yang mampu menyatukan masyarakat seluruhnya. Saya sekali lagi mengingatkan, masyarakat sudah pintar. Jangan mudah terpengaruh," tutupnya. (adv/set)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena saat meninjau kondisi masyarakat Berau di perbatasan Kutim.

MINTA PEMERINTAH TEGAS, SELESAIKAN PERSOALAN TAPAL BATAS BERAU-KUTIM

TANJUNG REDEB - Jeritan para petani yang tinggal di perbatasan antara Berau dan Kutai Timur (Kutim) kembali disuarakan Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena.

Ia membeberkan, persoalan tapal batas di wilayah tersebut hingga saat ini belum juga selesai. Karena hal itu, para petani tidak menikmati hasil kebun milik sendiri.

"Karena lahannya dirampas oleh Kutim dengan cara paksa. Dan itu telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini," ungkapnya.

Selain itu, ia juga kerap menerima keluhan dari para petani karena mereka

sering diintimidasi. Dimana mayoritas mereka merupakan petani sawit. Jika persoalan tapal batas ini tak kunjung ada kejelasan mereka yang dirugikan.

"Pihak Kutim mengatakan itu lahan mereka. Sedangkan, berdasarkan aturan yang berlaku, lahan itu milik Berau," tuturnya.

Darlena meminta Pemkab Berau bisa tegas untuk menuntaskan permasalahan tapal batas ini. Sebab, lahan di sana sudah diakui oleh Kutim dengan cara memasang tapal batas.

"Kami hanya memfasilitasi sebagai wakil rakyat, karena penentu kebijakan tetap kepala daerah," tandasnya. (adv/set)



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

DORONG PAGELARAN BERAU CULTURE FESTIVAL LEBIH MERIAH

TANJUNG REDEB - Pagelaran pawai bertajuk Berau Culture Festival berlangsung meriah. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai OPD dan paguyuban yang ada di Bumi Batiwakkal.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong menilai, pagelaran tersebut merupakan kegiatan yang sangat menarik. Terlebih juga menjadi hiburan untuk masyarakat.

"Saya harap dapat menjadi agenda tahunan, karena banyak dampak positif yang timbul," katanya.

Dirinya mendorong, Berau Culture Festival masuk kalender pariwisata. Sebab membawa dampak positif terhadap perekonomian, baik pelaku salon maupun pelaku UMKM yang menjajakan jualan mereka di sepanjang jalan yang dilalui peserta.

"Saya setuju. Kalau bisa ke depannya lebih

meriah lagi. Lebih banyak pesertanya," ujarnya.

Dilanjutkan Politikus Gerindra ini, festival tersebut dimintanya terus dipertahankan. Pasalnya, memiliki nilai lebih dalam sektor pariwisata.

"Ke depannya, jika bisa secara nasional. Ajak juga wisatawan dari luar negeri, untuk bisa ikut meramaikan. Inikan unik, orang luar pakai baju adat kita. Mengenalkan kepada mereka juga budaya Berau," ujarnya.

Peri berharap, ke depannya, kegiatan ini bisa dilaksanakan lebih meriah lagi, dan lebih banyak atraksi yang ditampilkan. Dia mengistilahkan, Indonesia dalam Berau yang memiliki arti berbagai kesenian dan budaya yang ada di Indonesia, bisa ditampilkan pada festival tersebut.

"Bukan tidak mungkin. Ini sangat bagus," tutupnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman.

MINTA PEMERINTAH SERIUS TINDAK LAHAN YANG TAK KANTONGI AMDAL

TANJUNG REDEB - Masih banyaknya lahan yang tidak memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) disorot Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman.

Dia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus memberi peringatan tegas melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Seharusnya pengelolaan lahan tanpa izin Amdal segera ditangani. Jangan dibiarkan begitu saja, karena menjadi dampak negatif bagi masyarakat," ungkapnya.

Dirinya menegaskan, OPD terkait harus dapat memastikan lahan yang dikelola setiap perusahaan sesuai dengan peraturan dan komitmen untuk lingkungan masyarakat.

"Jangan hanya mau mengam-
bil sumber daya alam saja, tapi

tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya, termasuk bagaimana komitmen perusahaan dalam mengelola lahan pasca dilakukan pertambangan," ucapnya.

Dikatakan Rahman, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan lahan namun tidak mengutamakan Amdal dalam pelaksanaannya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dirinya menyebut, pihaknya akan menjadwalkan pertemuan bersama pihak DLHK dan terkait lainnya untuk membahas hal tersebut lebih lanjut.

"Kami berharap DLHK lebih serius terhadap persoalan ini dan kami juga akan melakukan pembahasan hal ini lebih lanjut jika nanti sudah ada waktunya," pungkasnya. (adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Fraksi PPP DPRD Berau, Suharno dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi.

PENYELERASAN ANGGARAN HARUS SEPADAN DENGAN KONDISI KEUANGAN

TANJUNG REDEB - Dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi pada Selasa (7/11/2023) lalu, Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Berau, Suharno menyatakan pihaknya setuju dengan R-APBD tahun 2024.

Menurutnya, hal yang penting dalam rangka penyeragaman anggaran harus sepadan dengan kondisi keuangan daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan semangat dalam mengangkat konsep mendorong ke arah pencapaian visi Kabupaten Berau suatu langkah tepat dalam pelaksanaan misi berbasis kinerja dan berkarakter.

"Dengan APBD sebesar Rp 4 Triliun lebih, maka kami dari fraksi PPP mengimbau seluruh SKPD agar dapat mengoptimalkan kinerjanya supaya dengan waktu yang ada serapan anggaran yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ungkap Suharno.

Selain itu, pihaknya juga mendorong semua pihak untuk melaksanakan pembangunan secara optimal. Dengan catatan, tetap memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia secara sinergi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi terutama pada Dinas PUPR Berau dan OPD yang lainn-

ya dalam serapan belum maksimal.

Menurutnya, tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun, sehingga tujuan dari penganggaran harus dipahami oleh perumus kebijakan anggaran, yaitu anggaran harus berbasis kinerja dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

"Harapan kami setelah ditetapkannya rancangan APBD tahun anggaran 2024 ini agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan kemampuan pendapatan serta didukung oleh pembiayaan yang sehat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah, serta pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Berau," tuturnya.

"Kami dari fraksi PPP, mengingatkan kepada Pemkab Berau sesuai dengan janji pada waktu kampanye yaitu pembangunan dimulai dari pinggiran, di kota hanya pembenahan. Dengan segala kritik dan saran di atas semoga Pemkab Berau dapat lebih berbenah dalam melaksanakan programnya ke depan," pungkasnya. (adv/set)



KPU BALIKPAPAN TELAH TERIMA SEBAGIAN LOGISTIK PEMILU 2024



**PENCURI "BERTOPENG" DI BALIKPAPAN
AKHIRNYA DITANGKAP POLISI**



Ketua KPU Kota Balikpapan, Noor Thoha.

KPU BALIKPAPAN TELAH TERIMA SEBAGIAN LOGISTIK PEMILU 2024

BALIKPAPAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan telah menerima logistik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Logistik yang telah diterima pada tahap awal ini terdiri dari tinta, segel, segel plastik pengganti gembok, dan bilik suara.

Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha mengatakan, bilik suara yang diterima saat ini sebanyak 8.188 atau 4 kali dari jumlah TPS di Kota Balikpapan dan untuk tinta, KPU Balikpapan telah menerima sebanyak 4.094 botol.

"Segel itu kurang lebih jumlahnya 58 ribu ditambah segel plastik pengganti gembok, kalau kita kenal itu mirip sama kabel tis tapi ini lebih khusus," ujar Noor Thoha, Rabu (8/11/2023).

Lebih lanjut Thoha menjelaskan, saat ini logistik yang telah diterima KPU Balikpapan ditem-

patkan di gudang logistik baru yang berada di kawasan Jalan Alam Baru, Somber, Balikpapan Barat.

"Hari ini kita lakukan penghitungan, kita akan lihat mana yang rusak mana yang tidak, kalau ada yang rusak kita akan sisihkan nanti kita laporkan," jelasnya.

KPU Balikpapan hingga saat ini masih menunggu kiriman logistik lainnya. Sejumlah item seperti kotak suara hingga saat ini masih dalam perjalanan pengiriman. Diperkirakan pengiriman kotak suara tiba seluruhnya pada akhir November 2023 mendatang.

"Karena kotak suara, kemudian bilik itu yang buat KPU Provinsi, jadi kami hanya penerima manfaat saja, penerima barang jadi saja," tambah Thoha.

Selain kotak suara, KPU Balikpapan juga masih menunggu

proses penyelesaian surat suara. Di mana saat ini, KPU masih melakukan koreksi terhadap spesimen surat suara sebelum naik ketahap cetak.

"Kalau kelengkapan TPS lainnya seperti bantalan, paku, karet, tanda keluar masuk, ID card itu kita buat di sini nanti," ujarnya lagi.

KPU Balikpapan memperkirakan kebutuhan logistik pada Pemilu 2024 mendatang akan tuntas pada akhir Desember 2023 mendatang. Pihaknya pun masih akan menunggu kedatangan logistik lainnya untuk dilakukan proses pelipatan pada surat suara dan juga bilik suara.

"Kita ikuti saja, yang lelang juga bukan kita, prosesnya di KPU Provinsi dan KPU RI. Akhir bulan diperkirakan sudah tiba semua," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Pelaku pencurian AD saat digiring ke sel tahanan Polresta Balikpapan.

PENCURI "BERTOPENG" DI BALIKPAPAN AKHIRNYA DITANGKAP POLISI

BALIKPAPAN - Polresta Balikpapan melalui Unit Jatanras berhasil menangkap seorang pelaku pencurian berinisial AD (40) yang sempat viral di media sosial atas aksinya di sejumlah lokasi dan menggunakan topeng alias jebok.

Kanit Jatanras Polresta Balikpapan, Ipda Wempy Ardentia mengatakan, pelaku ditangkap pada Senin (6/11/2023) di rumahnya beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatannya.

"Pelaku ini melakukan pencurian menggunakan topeng di salah satu ruko yang menjual perlengkapan anak dan bayi di kawasan Kelurahan Damai Baru, Balikpapan Selatan," ujarnya, Rabu (8/11/2023).

Lebih lanjut Wempy menjelaskan, bahwa pelaku tidak hanya sekali melakukan aksi di ruko yang menjual perlengkapan anak dan bayi tersebut. Sebelumnya pada bulan Agustus pelaku juga melancarkan aksinya. Namun pelaku sempat kabur pulang ke kampung halamannya di NTB.

"Yang pertama di bulan Agustus dan kita

sudah berhasil mengidentifikasi pelaku ini. Karena ada rekaman CCTV dari ruko tersebut. Namun, yang kedua kalinya ini kita langsung bergerak cepat," jelasnya.

Rupanya pelaku tidak hanya menasar toko yang menjual perlengkapan anak dan bayi saja, 3 ruko lainnya yang berada di sampingnya juga menjadi sasaran pelaku. Bahkan di Polsek Balikpapan Utara juga terdapat laporan polisi terkait pencurian dan identifikasi pelakunya serupa dengan AD ini.

"Pengakuannya ada 4 ruko. Tapi di Polsek Utara ada LP terkait tindak pencurian juga dan ciri-ciri pelaku sama, menggunakan topeng juga," tambah Wempy.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, pelaku mengaku terpaksa melancarkan aksinya ini karena terdesak kebutuhan ekonomi.

"Kita sangkakan dengan Pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman kurungan penjara 7 tahun," tutup Wempy.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib.

NAJIB SOROTI REGULASI BARU IZIN PENGGUNAAN SUMUR AIR TANAH

BALIKPAPAN - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan penggunaan air tanah harus memiliki izin dari kementerian terkait.

Aturan soal izin ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.C tahun 2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang dikeluarkan pada 14 September 2023 lalu.

Hal ini mendapat perhatian dari anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib terkait regulasi baru terkait penggunaan sumur dalam air tanah.

Najib menyebut, selama ini izin membuat sumur dalam tanah dikelola oleh pemerintah Provinsi Kaltim. Namun jika kewenangan diambil alih pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, maka masyarakat tidak bisa seenaknya mengambil dan memanfaatkan air tanah dan sungai lagi.

"Sudah barang tentu, pemerintah Provinsi Kaltim tidak mempunyai kekuatan lagi untuk

memberikan izin penggunaan air tanah," ujarnya, Rabu (8/11/2023).

Lebih lanjut Najib menjelaskan, dampak lain yang akan ditimbulkan bagi Kota Balikpapan tidak ada lagi bantuan keuangan (Bankue) Provinsi yang diambil dari pajak air sumur dalam tanah.

"Yang jadi masalah, bagaimana menggunakan sumur tanah dalam yang digunakan keperluan fasum-fasos. Termasuk masyarakat yang pakai air tanah wajib izin. Bagaimana dengan sumur yang sudah lama ada kan," jelasnya.

Untuk itu, Komisi I akan melakukan pemanggilan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan untuk memintai penjelasan terkait persoalan tersebut.

"Kita coba akan lakukan diskusi dengan DPMPT dulu, seperti apa sih regulasinya ini dilapangan nantinya," tutup Najib. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Japar Sidik

TIDAK ADA TITIK TERANG SOAL BANJIR DI GPA, DPRD SARANKAN PEMKOT PAKAI JALUR HUKUM

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan turut dibuat geram, lantaran kedua pengembang perumahan yakni Griya Permata Asri (GPA) dan Daun Village belum juga menuntaskan persoalan permasalahan banjir di Perumahan GPA.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Japar Sidik mengatakan, permasalahan banjir di Perumahan GPA ini demi kepentingan masyarakat setempat, dan ini merupakan tanggungjawab pemerintah maupun DPRD sebagai lembaga pengawas di pemerintahan.

Japar Sidik juga tegaskan, bahwa permasalahan banjir di GPA ini muaranya ada di dua pengembang yang masing-masing mempertahankan argumentasinya dan merasa benar masing-masing.

"Akhirnya yang dikorbankan adalah masyarakat. Karena penyebab banjir air tak bisa dibuang," ujarnya, Rabu (8/11/2023).

Menurut Japar, antara pengembang Griya Permata Asri (GPA) dan Daun Village harusnya memikirkan bersama-sama bagaimana mencari solusi terkait hal tersebut.

"Jika sama-sama memikirkan, artinya biaya ditimbulkan sama-sama ditanggung. Semestinya kan sederhananya begitu. Sehingga masyarakat tidak dikorbankan," jelasnya.

Dia juga menegaskan bakal terus mengawal persoalan banjir di GPA ini sepanjang pihaknya mengikuti pertemuan untuk mencari solusi terkait permasalahan tersebut.

Di samping itu dirinya juga mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Jika memang tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka jalur hukum harus ditempuh.

"Hukum aja yang bermain. Masa masyarakat digantung seperti ini dibiarkan terdampak banjir, itu nggak boleh. Itu tanggungjawabnya pemerintah dan harus ada solusinya. Pemerintah harus tegas, masa kalah sama pengembang, kan kasian masyarakat yang dikorbankan," tutupnya. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono.

BUDIONO SEBUT INISIATIF PENYERAHAN FASUM MASIH RENDAH

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan mengeluhkan masih rendahnya inisiatif pengembang yang menyerahkan fasilitas umumnya kepada pemerintah. Hal itu pun berdampak pada kesulitan pemerintah melakukan perbaikan. Sementara cukup banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan dan permintaan perbaikan atas fasilitas umum.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengatakan, laporan yang ada sudah menunjukkan hal tersebut. Tercatat baru sekitar 50 pengembang yang menyerahkan aset fasilitas umum ke pemerintah setempat. Padahal jumlah pengembang yang tercatat beroperasi di Balikpapan mencapai 230-an.

"Pengembang itu ada sekitar 230 lebih itu mungkin nggak sampai 50 yang baru menyerahkan. Mungkin ya, bahkan kurang dari 50 pengembang," ujarnya, Rabu (8/11/2023).

Lebih lanjut Budiono menjelaskan, kendala yang dihadapi terkait banyaknya pengembang yang belum memenuhi aturan pembangunan perumahan. Seperti, pengaturan persentase

kawasan di setiap daerah pemukiman.

Peraturan daerah setempat mewajibkan pengembang memiliki fasilitas pemakaman, jalan umum drainase hingga ruang terbuka hijau. Persentasenya mencapai sekitar 40 persen dari total lahan milik pengembang.

"Dari informasi OPD yang menangani, masih banyak syarat-syarat yang belum terpenuhi. Karena di Perda kita itu ada 40 persen yang masuk dalam sarana prasarana umum. Mulai dari jalan, drainase, RTH hingga pemakaman," jelasnya.

Untuk itu Budiono terus meminta kepada Pemerintah Kota Balikpapan untuk bersikap tegas kepada para pengembang, agar mau sesegera mungkin menyerahkan fasilitas umumnya.

"Ini kan juga untuk mempermudah pemkot melakukan perbaikan atau normalisasi fasum-fasum yang ada, yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat," tutupnya. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Raker Komisi III DPRD Balikpapan bersama mitra kerjanya di ruang Meranti Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (8/11).

KOMISI III BERSAMA MITRA KERJA GELAR RAKER INVENTARIS KAJIAN DAN NASKAH AKADEMIK

BALIKPAPAN - Dalam rangka inventarisasi kebutuhan kajian akademik dan naskah akademik, serta persiapan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2024, Komisi III DPRD Balikpapan menggelar rapat kerja (Raker) bersama mitra kerjanya pada Rabu (8/11/2023).

Mitra kerja tersebut yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertahanan dan Penataan Ruang (DPPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Administrasi Pembangunan.

Kordinator Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecale mengatakan, rapat kerja ini untuk mendiskusikan kajian akademik dan naskah akademik.

Dalam kesempatan tersebut komisi III DPRD Kota Balikpapan mengundang OPD mitra untuk mendiskusikan berkaitan dengan kajian dan naskah akademik yang dianggap urgensi tentang pembangunan.

"Itulah yang akan kita minta kajiannya, kare-

na kajian ini ada dari inisiatif DPRD dan Pemkot Balikpapan untuk mensinkronisasikan hal-hal yang dianggap urgensi," ujarnya.

Lebih lanjut Sabaruddin menjelaskan, untuk naskah akademik jika memang itu sudah dianggap final, maka akan ditingkatkan menjadi peraturan daerah (Perda) karena telah menggunakan anggaran pemerintah Kota Balikpapan dan sudah dilaksanakan bersama.

"Inilah substansi rapat kerja dalam pertemuan antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan," jelasnya.

Tiga naskah akademik tersebut berasal dari DLH, Disperkim dan Dishub. Diakuinya, ketiga itu sangat urgensi, apalagi terkait penanganan sampah pesisir dan limbah beracun.

"Penanganan sampah dianggap tantangan Balikpapan karena bersamaan dengan kota nyaman dihuni sekitar kota yang bersih, indah, aman dan nyaman. Kemudian, limbah itu juga banyak kita menyaksikan yang tidak termonitor dengan baik sehingga jadi momok buat kita semuanya," tutupnya. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA
TERDEPAN

RADAR PASER

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI KAMIS
9 NOV 2023



KELEBIHAN KAPASITAS, WBP GROGOT DIPINDAH KE SAMARINDA

**LAPORAN KEBERLANJUTAN KIDECO
DIGANJAR PENGHARGAAN GOLD RANK
THE 19TH ASRRAT 2023**





Rutan Kelas 2 B Tanah Grogot

KELEBIHAN KAPASITAS, WBP GROGOT DIPINDAH KE SAMARINDA

PASER - Jumlah penghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 2 B Tanah Grogot yang tengah menjalani masa hukuman berkurang. Hal ini bukan karena dibebaskan namun karena dipindahkan ke Lembaga Permasayarakatan (Lapas) Kelas 2 A Samarinda.

Pemindahan para terpidana atau yang kini disebut warga binaan pemasyarakatan (WBP) itu, dijelaskan Kepala Rutan Kelas 2 B Tanah Grogot, Bayu Muhammad, guna mengurangi kelebihan kapasitas WBP yang terjadi.

Hal ini merupakan upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) RI Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang sudah terlaksana sejak Minggu (5/11/2023).

"Itu merupakan upaya kami

dalam mengurangi kelebihan jumlah WBP di rutan, yang kondisinya sudah penuh atau melebihi daya tampung sebagaimana mestinya," terang Bayu, Rabu (8/11/2023).

Hingga hari ini, jumlah WBP yang ada di dalam Rutan Kelas 2 B Tanah Grogot mencapai 682 orang. "Sementara kapasitas hunian kami hanya bisa menampung 160 orang. Hal itu menyebabkan tingkat over kapasitas mencapai 400 persen," tambahnya

Diakui, pihaknya juga telah menjalin koordinasi yang solid dengan Kanwil Kemenkumham RI Provinsi Kaltim dan UPT Pemasyarakatan, sehingga pemindahan WBP dapat terlaksana dengan baik.

Senada dengan Kepala Kesatuan Keamanan Rutan (Ka.KPR), Achmad Zaki Al Hasni, yang

mengaku pemindahan WBP sebagai bentuk pembinaan lanjutan. "Warga binaan itu nantinya kembali mendapat program pembinaan di Lapas, namun lebih intensif lagi," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 A Samarinda, melalui Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka.PLP) Sukardi menyampaikan, pihaknya menjalin sinergi dengan seluruh UPT Pemasyarakatan guna terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.

"Pemindahan WBP Rutan Tanah Grogot ke Lapas Samarinda merupakan hasil sinergitas dengan Kantor Wilayah dan Pas Kaltimara. Selain menangani over kapasitas, pemindahan itu juga sebagai upaya pengendalian pengamanan," tutupnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Direktur Utama Kideco, M. Kurnia Ariawan menerima Gold Rank pada The 19 th ASRRAT 2023

LAPORAN KEBERLANJUTAN KIDECO DIGANJAR PENGHARGAAN GOLD RANK THE 19TH ASRRAT 2023

PASER - Penyusunan laporan keberlanjutan atau sustainability report PT Kideco Jaya Agung (Kideco) membuatnya kembali meraih penghargaan dan apresiasi dari National Center for Corporate Reporting (NCCR), di Raffles Hotel Jakarta, Senin (6/11/2023).

Penghargaan itu berupa peringkat Gold Rank pada The 19 th Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT 2023). Adapun penghargaan itu sebagai perusahaan yang telah menjalankan praktik tatakelola yang baik melalui penyusunan laporan keberlanjutan.

Chairman Executive Director of NCCR, Ali Darwin menjelaskan, terjadi peningkatan partisipasi peserta yang menandakan komitmen dan dedikasi institusi di Indonesia dan luar negeri semakin meningkat untuk keberlanjutan melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab.

"Partisipasi peserta ASRRAT 2023 yang berjumlah 68 peserta, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 50 peserta," katanya.

Sementara itu, Chairman Board of Trustee NCCR, Bambang Brojonegoro menyampaikan, ASRRAT 2023 tahun ini mengambil tema Navigating the Path to Net Zero: Accelerating Climate Action in Asia.

Disebutnya, Bumi telah mengalami peningkatan suhu sebesar 1,1°C, akibat aktivitas manusia saat ini. Hal ini dinilai cukup mengkhawatirkan sehingga harus ada upaya nyata mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Upaya nyata mengurangi itu harus dilakukan secara signifikan dan untuk mencapai Net Zero Emission 2050 untuk memitigasi peningkatan suhu dan perubahan iklim tersebut". sebutnya.

Direktur Utama Kideco, M. Kurnia Ariawan menyampaikan, pihaknya berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini merupakan hasil dedikasi atas upaya perbaikan dan penyempurnaan kualitas laporan berkelanjutan

operasional bisnis bagi Kideco.

"Kideco juga berkomitmen pada pengungkapan informasi yang akurat dan relevan kepada para pemangku kepentingan. Penghargaan ini diharapkan dapat memperkuat capaian sebagai perusahaan yang akuntabel dan bertanggung jawab," tuturnya.

Lebih lanjut Kurnia menambahkan, Kideco mengedepankan transparansi, integritas, dan dedikasi dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan. Kideco berharap bahwa prestasi ini akan menjadi inspirasi bagi perusahaan lain.

"Tentunya dalam membangun masa depan yang lebih baik dan bertanggung jawab," ujarnya.

Untuk diketahui, tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-19 ASRRAT sejak tahun 2005. Tidak hanya dari Indonesia, acara penghargaan ini turut diikuti 4 perusahaan asing yang berasal dari Filipina, Bangladesh, Rusia, dan Australia.

Penghargaan ASRRAT membagikan peringkat pelaporan menjadi lima tingkatan, yaitu Platinum, Gold, Silver, Bronze, dan White (NoTrophy). Penilaian ini dilakukan oleh pane Ijuri dan penilai dari kalangan akademisi bersertifikasi sebagai Sustainability Reporting Specialists.

Sementara, penyusunan laporan keberlanjutan itu sendiri merupakan laporan yang berisi informasi kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial yang dilakukan dalam periode satu tahun.

Pada kesempatan itu, penghargaan Gold Rank pada The 19 th ASRRAT 2023 diberikan langsung oleh Chairman of ASRRAT Jury Committee 2023, Irvan Adi Ekaputra kepada Direktur Utama Kideco, M. Kurnia Ariawan.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Paser, Yusuf

TERBUKTI MELANGGAR, 5 PANGKALAN GAS ELPIJI DI PASER DICABUT

PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memberi sanksi kepada 5 pangkalan gas elpiji lantaran dituding melakukan pelanggaran pada distribusi tabung gas Elpiji bersubsidi. Sanksi itu berupa pencabutan izin.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM Kabupaten Paser, Yusuf menjelaskan, pemberian sanksi berupa pencabutan itu setelah melalui beberapa mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

"Empat pangkalan sudah dicabut izin usahanya dan satu pangkalan mengundurkan diri dan sedang proses pencabutan izin," kata Yusuf, Rabu (8/11/2023).

Kelima pangkalan itu di antaranya 1 pangkalan di Desa Lombok, Kecamatan Long Ikis dan 4 pangkalan di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot. Yusuf mengatakan pencabutan izin usaha tersebut dilakukan oleh pihak Pertamina.

Adapun pencabutan ini mulanya berdasarkan adanya laporan dari masyarakat tentang penyalahgunaan penjualan tabung gas bersubsidi. Sebelum ini telah melakukan pembinaan kepada pemilik pangkalan agar mendistribusikan tabung gas sesuai ketentuan yang telah diatur.

"Seharusnya saat pangkalan menerima tabung gas dari agen, mereka harus menjualnya kepada masyarakat. Laporan dari

masyarakat tabung gas di pangkalan sudah habis, dan sebagainya," ucapnya.

Pemkab Paser bersama Pertamina telah melakukan uji coba pendistribusian tabung gas yang dilakukan pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Uji coba ini sudah dilakukan di Desa Lombok, Kelurahan Tanah Grogot, dan Desa Tapis.

"Dengan pendistribusian dilakukan oleh pemerintah desa melalui BUMDes-nya, harapan kami tabung gas Elpiji bisa didistribusikan kepada masyarakat yang benar-benar terdaftar dan terdata dalam Daftar Penerima Tetap (DPT)," terang Yusuf.

Setelah dilakukan uji coba di tiga lokasi itu, Disperindagkop akan menasar lokasi lain yang diduga terdapat penyalahgunaan pendistribusian di Desa Padang Pangrapat, Senaken, dan Tepian Batang.

"Beberapa pangkalan yang melanggar di tiga lokasi itu masih bisa diingatkan sehingga izinnya tetap beroperasi," ucap Yusuf.

Ia menegaskan pendistribusian tabung gas bersubsidi ini masih tahap uji coba. Ke depan tidak menutup kemungkinan pendistribusian bisa dilakukan oleh Bumdes. "Dalam hal ini kami berharap ada kerjasama dari pihak desa untuk menyelesaikan permasalahan," tutup Yusuf.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari